



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM.
BUPATI GROBOGAN

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2017
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2017 dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan, sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan LPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Ringkasan LPPD ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2017, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

Tanggapan atau saran itu dapat disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 bulan setelah Ringkasan LPPD disampaikan.

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², Kabupaten Grobogan memiliki wilayah terluas ke-2 se-Provinsi Jawa Tengah, dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Purwodadi. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan.

B. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.449.791 jiwa, yang terdiri dari 729.738 laki-laki dan 720.053 perempuan, mengalami pertumbuhan penduduk 0,39% atau bertambah 5.589 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 734 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.780 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Geyer sebesar 342 jiwa/km².

Ditinjau dari angka ketergantungan penduduk, pada tahun 2017 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.026.146 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 423.645 jiwa, sehingga angka rasio ketergantungan adalah 41%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 41 orang yang non produktif.

Jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 14,87% pada tahun 2013 dan berurutan mengalami

penurunan menjadi 13,86% pada tahun 2014, 13,68% pada tahun 2015, 13,57% pada tahun 2016 dan pada akhir tahun 2017 sebesar 13,13%.

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan penduduk, tamat SD atau sederajat sebanyak 42,57%, tidak atau belum tamat SD sebanyak 27,96%, tamat SLTP atau sederajat 17,19%, tamat SLTA atau sederajat 9,92%, dan tamat Akademi, S1, S2 dan S3 sebanyak 2,36%.

Selanjutnya dari Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir masuk kategori SEDANG dan selalu mengalami kenaikan, mulai dari 66,39 pada tahun 2012 menjadi 68,52 pada tahun 2016.

C. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan positif, terakhir pada tahun 2016 mencapai 4,46%. PDRB Perkapita juga kondisinya terus mengalami kenaikan. Atas dasar harga berlaku, PDRB Perkapita tahun 2016 terhitung sebesar Rp.16.002.100,- atau naik sebesar 7,15% dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 2,41% , tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,03%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 4,05%.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun, yaitu " **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh**".

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka disusunlah misi daerah sebagai rumusan umum tindakan konkret yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata.

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya.
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang.
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat.
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

B. PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017, prioritas pembangunan tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur.
2. Pemberdayaan Sektor Pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
3. Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun yang Terjangkau dan Berkualitas.
4. Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas, serta Pemberian Santunan bagi Warga Grobogan yang meninggal dunia.
5. Perlindungan Usaha dan Kesempatan Kerja secara luas dan menyeluruh.

III. KEUANGAN DAERAH

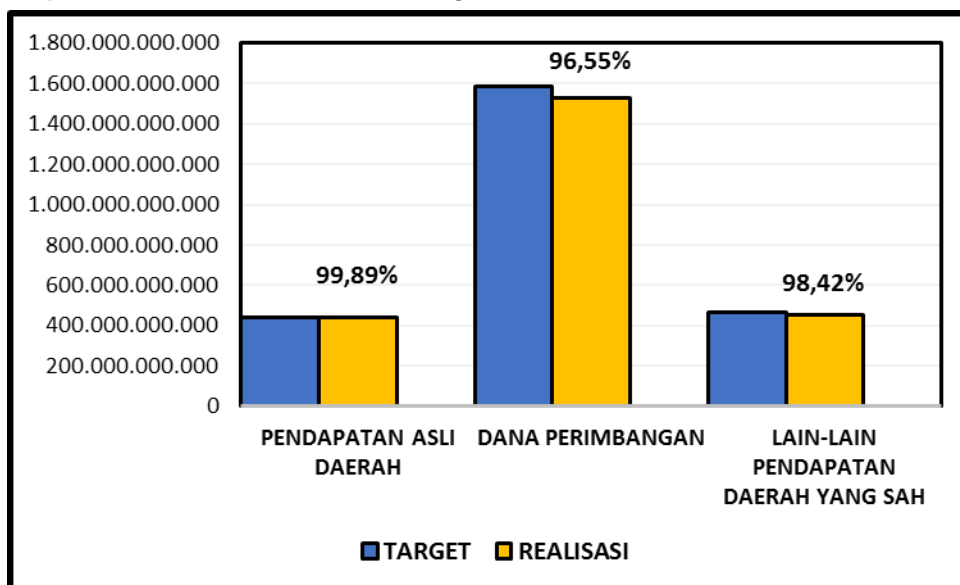
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017.

Selanjutnya, secara ringkas disampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun perlu diketahui bahwa angka realisasi APBD yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 sebesar Rp.2.489.049.567.445,- terealisasi Rp.2.426.633.726.629,- atau 97,49%, dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.440.891.892.189,- terealisasi Rp.440.415.301.299,- atau 99,89%, target Dana Perimbangan sebesar Rp.1.584.695.623.202,- terealisasi Rp.1.530.097.859.511,- atau sebesar 96,55%, dan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.463.462.052.054,- terealisasi Rp.456.120.565.819,- atau 98,42%.

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 1
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017

Adapun secara rinci target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017, adalah sebagaimana tabel berikut:

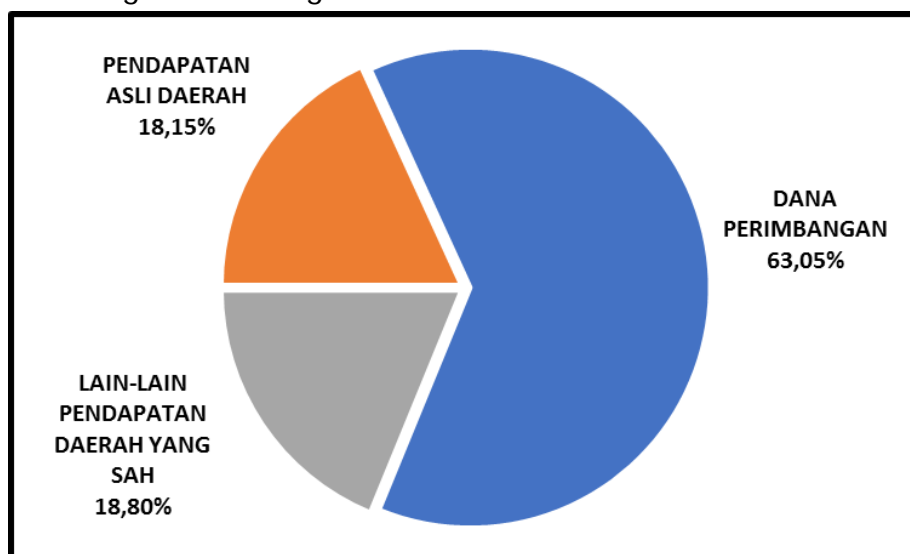
Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN	2.489.049.567.445	2.426.633.726.629	97,49
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	440.891.892.189	440.415.301.299	99,89
1	Pendapatan Pajak Daerah	59.690.000.000	70.776.441.886	118,57
2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.487.011.256	13.691.958.614	94,51

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.914.119.723	27.965.738.948	100,18
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	338.800.761.210	327.981.161.851	96,81
B	DANA PERIMBANGAN	1.584.695.623.202	1.530.097.859.511	96,55
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	59.946.776.202	47.730.176.649	79,62
2	Dana Alokasi Umum	1.091.590.533.000	1.091.590.533.000	100
4	Dana Alokasi Khusus	425.658.314.000	383.277.149.862	90,04
5	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	100
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	463.462.052.054	456.120.565.819	98,42
1	Pendapatan Hibah	5.898.678.600	5.928.137.350	100,50
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	156.300.749.454	153.422.841.469	98,16
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	229.625.434.000	229.625.434.000	100
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	71.637.190.000	67.144.153.000	93,73

Sumber : BPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum selesai diaudit BPK)

Kontribusi terbesar dari Pendapatan Daerah masih dari Dana Perimbangan sebesar 63,05%, selanjutnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 18,80% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,15%. Komposisi penyumbang pendapatan Daerah ini, lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

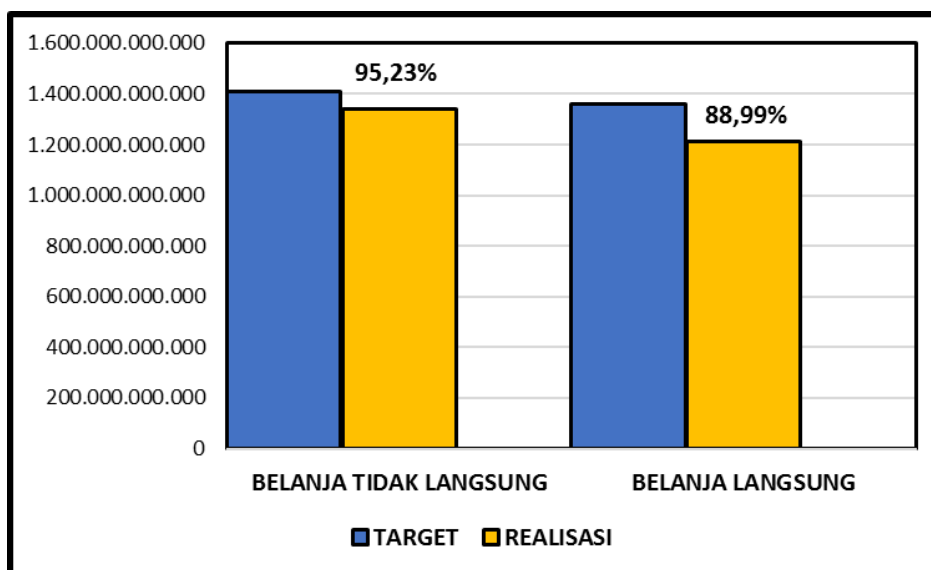


Gambar 2
Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah Tahun 2017

B. BELANJA DAERAH

Target belanja Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebesar Rp.2.770.227.562.352,- terealisasi sebesar Rp.2.553.130.422.697,- atau 92,16%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.409.305.955.412,- terealisasi sebesar Rp.1.342.042.039.747,- atau 95,23% dan target Belanja Langsung sebesar Rp.1.360.921.606.940,- terealisasi Rp.1.211.088.382.950,- atau sebesar 88,99%.

Serapan Belanja Daerah dimaksud dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 3
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2017

Adapun secara rinci target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017, adalah sebagaimana tabel berikut:

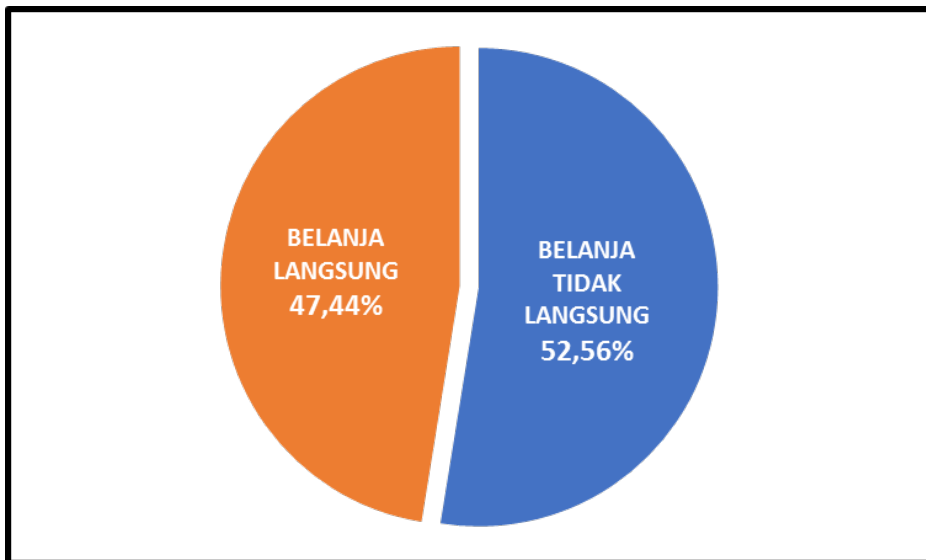
Tabel 2
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	2.770.227.562.352	2.553.130.422.697	92,16
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.409.305.955.412	1.342.042.039.747	95,23
1	Belanja Pegawai	922.399.063.539	866.636.879.160	93,95
2	Belanja Bunga	8.937.641.277	2.879.142.297	32,21
3	Belanja Subsidi	506.500.000	503.500.000	99,41
4	Belanja Hibah	37.679.700.000	37.240.300.000	98,83
5	Belanja Bantuan Sosial	11.451.450.000	9.574.523.896	83,61
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	418.523.285.220	416.908.216.550	99,61

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
7	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.299.477.844	8.299.477.844	100
8	Belanja Tidak Terduga	1.508.837.532	0	0
B	BELANJA LANGSUNG	1.360.921.606.940	1.211.088.382.950	88,99
1	Belanja Pegawai	84.833.253.175,67	78.277.142.797	92,27
2	Belanja Barang dan Jasa	601.409.296.674,33	529.457.335.685	88,04
3	Belanja Modal	674.679.057.090	603.353.904.468	89,43

Sumber : BPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum selesai diaudit BPK)

Sedangkan Komposisi serapan belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 52,56% dan belanja langsung 47,44%, dapat disajikan dalam Gambar sebagai berikut :



Gambar 4
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2017

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2017 mencapai Rp.297.521.678.641,- atau 92,42% dari target penerimaan sebesar Rp.321.931.594.907,-. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp.35.553.600.000,- atau 87,24% dari target pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.40.753.600.000,-.

Selanjutnya berdasarkan perhitungan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2017, terdapat Defisit sebesar Rp.126.496.696.068,-, namun dengan pembiayaan netto sebesar Rp.261.968.078.641,- defisit

tersebut dapat ditutup, sehingga didapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2017 sebesar Rp.135.471.382.573,-.

Realisasi pembiayaan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2017

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pendapatan	2.489.049.567.445	2.426.633.726.629	97,49
2	Belanja	2.770.227.562.352	2.553.130.422.697	92,16
	Surplus/Defisit	-281.177.994.907	-126.496.696.068	44,99
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	321.931.594.907	297.521.678.641	92,42
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.753.600.000	35.553.600.000	87,24
	Pembiayaan Netto	281.177.994.907	261.968.078.641	93,17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	135.471.382.573	-

Sumber : BPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum selesai diaudit BPK)

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp.1.360.921.606.940,- terealisasi sebesar 88,99%.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2017, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

A. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur telah diupayakan melalui peningkatan jalan kabupaten sesuai kondisi keuangan daerah. Dari seluruh jalan kabupaten sepanjang 890,01 km, jalan dengan kondisi baik/mantap mencapai 66,06% atau sepanjang 587,95 km, meningkat 160,07 km dibandingkan tahun lalu. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 6,54% atau 58,21 km, berkurang 19,04 km dibandingkan tahun lalu. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 12,92% atau 114,95 km, berkurang 60,77 km dibandingkan tahun lalu. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 14,48% atau 128,90 km, berkurang 80,26 km dibandingkan tahun lalu.

B. Pemberdayaan Sektor Pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat

Usaha untuk memberdayakan sektor pertanian dilakukan baik dari sisi peningkatan sarana dan prasarana pertanian maupun produksi pertanian. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang dilakukan pada tahun 2017, antara lain: rehab saluran sekunder sepanjang 12,39 km, normalisasi avour/sungai sepanjang 9 km, pembuatan embung sebanyak 4 buah, pembangunan bendung sebanyak 4 buah, serta rehab bendung sebanyak 6 buah.

Untuk produksi pertanian, antara lain produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 6,20 ton per hektar, mengalami peningkatan sebesar 0,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dalam produksi perikanan tahun 2017 sebesar 3.226 ton, meningkat 6,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan usaha untuk memberdayakan sektor UMKM pada tahun 2017 dilaksanakan melalui kegiatan, diantaranya pembinaan dan pelatihan terhadap Industri Kecil dan Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta pameran dalam rangka promosi produk IKM dan UMKM, baik pada tingkat lokal, provinsi maupun nasional.

C. Mewujudkan wajib belajar 12 Tahun yang terjangkau dan berkualitas

Pencapaian prioritas ini ditempuh melalui penyelenggaraan Urusan Pendidikan. Mulai tahun 2017, kewenangan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten hanya sampai pada tingkat SLTP. Sedangkan pengelolaan pendidikan tingkat SLTA berada pada pemerintah provinsi. Meskipun demikian, perhatian kita terhadap wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Grobogan tidak bisa kita kesampingkan.

Pada tahun 2017, terdapat berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar, antara lain pembangunan ruang kelas baru sebanyak 3 kegiatan, rehabilitasi gedung dan ruang kelas sebanyak 10 kegiatan, pengadaan peralatan penunjang pendidikan sebanyak 6 kegiatan, pelatihan para guru sebanyak 9 kegiatan serta berbagai lomba pendidikan untuk memacu prestasi anak didik.

Di samping itu, untuk mendukung prioritas pendidikan, juga ditunjang dengan belanja tak langsung, antara lain berupa bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bantuan tunjangan fungsional Guru Pra Dikdas, Guru MI, MTs, MA dan TU Non PNS serta bantuan operasional guru lembaga pendidikan keagamaan non formal.

D. Tersedianya fasilitas kesehatan yang Terjangkau dan berkualitas, serta pemberian santunan bagi warga Grobogan yang meninggal dunia

Pada tahun 2017, fasilitas kesehatan terus menerus ditingkatkan, diantaranya melalui pembangunan dan rehab Puskesmas dan Puskesmas pembantu, sehingga saat ini tidak terdapat lagi Puskesmas dalam kondisi rusak, dari total 30 Puskesmas, 26 diantaranya dalam kondisi baik dan sisanya dalam kondisi sedang. Untuk Puskesmas pembantu dengan kondisi baik meningkat 11,59% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk kondisi sedang dan rusak masing-masing mengalami penurunan sebesar 5,80% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, untuk santunan bagi warga Grobogan yang meninggal dunia, telah disalurkan bantuan sosial kepada 436 warga miskin pada tahun 2017.

E. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh

Pencapaian prioritas ini pada tahun 2017, didukung program dan kegiatan dalam rangka perlindungan terhadap dunia usaha serta lebih memberikan kemudahan bagi penanaman modal, antara lain : penyusunan peraturan mengenai pelayanan perijinan dan penanaman modal, revisi standar pelayanan perijinan serta pengembangan aplikasi sistem informasi perijinan terpadu.

Sedangkan untuk kesempatan kerja, dapat dilihat dari capaian pencari kerja yang ditempatkan, yaitu dari 11.351 orang pencari kerja pada tahun 2017, 70,81% diantaranya telah ditempatkan.

Berdasarkan data yang ada, jumlah industri, baik industri besar, sedang, kecil maupun industri rumah tangga sampai dengan tahun 2017 sebanyak 18.512 buah, meningkat 0,69% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah UMKM sebanyak 29.743 buah, meningkat 9,45%

dibanding tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan jumlah industri dan UMKM ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Grobogan.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui 3 Kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, serta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan total anggaran sebesar Rp. 62.461.745.900,- dan terserap sebesar Rp. 59.868.536.203,- atau 95,85%, dengan perincian sebagai berikut :

- A. Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan anggaran Rp. 950.000.000,- terealisasi 95,33%, dengan realisasi kegiatan terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pemasaran KUMKM.
- B. Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian, dengan anggaran Rp.49.364.745.900,- terealisasi 95,50%, dengan realisasi kegiatan diantaranya pengelolaan irigasi tersier seluas 500 Ha, kawasan bawang merah 215 Ha serta kawasan aneka cabai seluas 50 Ha.
- C. Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, dengan anggaran Rp.12.000.000.000,- terealisasi 97,25%, dengan realisasi kegiatan diantaranya terlaksananya pembangunan Pasar Umum Tegowanu dan Pasar Umum Grobogan.
- D. Tugas Pembantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan anggaran Rp. 147.000.000,- terealisasi 99,90% dengan realisasi kegiatan terlaksananya pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017, antara lain sebagai berikut :

- A. Kerja sama antar daerah, berupa kerja sama regional Kedungsepur yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Demak, Grobogan, Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga, kerja sama penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah serta kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Batang mengenai Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- B. Kerja sama dengan pihak ketiga, antara lain dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, *Education Development Center (EDC)* FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muria Kudus, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit dan lain-lain.
- C. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Instansi Vertikal, dalam rangka mencapai keterpaduan, keselarasan, kesamaan langkah dan keharmonisan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- D. Terkait dengan pembinaan batas wilayah, pada tahun 2017 dilaksanakan Kegiatan Inventarisasi Permasalahan Batas Daerah, dengan realisasi terlaksananya inventarisasi yang berpedoman pada Permendagri mengenai batas daerah Kabupaten Grobogan, meliputi kesesuaian posisi pilar batas dengan titik koordinat pada Permendagri, kondisi fisik patok/pilar batas daerah, kondisi sosial budaya masyarakat serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di 16 kecamatan di Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan 7 kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.
- E. Dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi pemetaan potensi bencana alam, penyediaan bahan bantuan bencana alam, melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, bantuan air bersih, pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir dan lain-lain.

F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan unsur masyarakat.

G. Hal Lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
2. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2017;
3. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Layak Anak kategori 'Pratama';
4. Penghargaan Nasional dari Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2017 Kategori Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
5. Penghargaan Nasional Akreditasi Rumah Sakit "Paripurna" oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
6. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional a.n. SMA N 1 Toroh;
7. Peringkat I Nasional Musabaqoh Qiroatul Kutub a.n. Hadi Nashiri Zaenal Muttaqin;
8. Peringkat I Nasional Lomba Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan a.n. Kelompok Tani 'Ngudi Rejeki I' Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi;
9. Peringkat I Nasional Kontes Produk Unggulan Hortikultura Kategori Bawang Merah a.n. Tri Joko Purnomo, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Grobogan;

serta masih banyak penghargaan lainnya baik dari tingkat nasional maupun tingkat provinsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan yang meliputi aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki sebagai Kepala Daerah.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Grobogan sehingga dapat berjalan secara baik dan kondusif.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreativitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa meridloi setiap langkah kita dalam membangun Kabupaten Grobogan. Aamiin ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwodadi, 26 Maret 2018



BUPATI GROBOGAN

Hj. SRI SUMARNI, SH, MM